



Proyek Mangkrak, Warga Terganggu

Lubang Bekas Galian Dibiarkan Menganga

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tengah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kelanjutan proyek saluran air hujan (SAH) Jalan Supomo. Pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah, proyek pembangunan berhenti total alias mangkrak.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) tidak ingin bertindak gegabah. Dia menyadari proyek tersebut masih dalam objek pemeriksaan KPK. Di satu sisi pembangunan SAH kawasan itu tergolong krusial. Apalagi beberapa ruas jalan telah dibongkar dengan lubang menganga. ▶ Baca Proyek... Hal 7



PASCA OTT KPK: Tulisan aspirasi masyarakat menghiiasi papan proyek saluran air hujan (SAH) di Jalan Babaran, Kota Jogja, kemarin (26/8).



Sudah telanjur dibongkar lalu kena OTT. Dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) menyarankan untuk dihentikan, tapi kami tetap konsultasi dengan KPK."

HEROE POERWADI

Wakil Wali Kota Jogja

IMBAS PEMBONGKARAN

- Keterbatasan akses jalan.
- Beberapa lubang galian tepat berada di depan rumah warga.
- Lubang-lubang itu dibiarkan tanpa ada pengerjaan. Tidak terlihat para pekerja dan alat-alat berat.
- Warga harus lebih hati-hati karena banyak lubang dan besar-besar.

▪ Warga tidak nyaman.

1.
2.
3.
4.

"Sudah terlanjur dibongkar lalu kena OTT. Dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) menyarankan untuk dihentikan, tapi kami tetap konsultasi dengan KPK," jelas HP kemarin (26/8).

Menurutnya, hajat hidup masyarakat sekitar perlu dipertimbangkan. Imbas dari pembongkaran adalah keterbatasan akses jalan. Bahkan beberapa lubang galian tepat berada di depan rumah warga.

Kini lubang-lubang itu dibiarkan tanpa ada pengerjaan. Tidak terlihat pula para pekerja yang sedang menggarap proyek Supomo. Alat-alat berat juga mulai digeser dari tempat pengerjaan semula.

Salah seorang warga pelintas, Deswita mengungkapkan tidak nyaman dengan kondisi jalan yang seperti itu. Ia selalu melewati



WINDA SETRA/BA PUPUKP/DAKAR JOGJA

REPOT: Pengendara motor melewati Jalan Babaran, lokasi proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) yang mangkrak, kemarin (26/8).

jalan tersebut sebagai jalur alternatif untuk berangkat kerja. "Iya gak nyaman ya. Apalagi harus lebih hati-hati karena banyak lubang dan besar-besar," ujarnya.

HP mengatakan, misalnya proyek senilai Rp 8,3 miliar itu berlanjut, apakah tetap dengan pengembang yang sama atau

baru atau kembali dilelangkan. "Kalau dihentikan, berarti mau tidak mau dikembalikan ke fungsi jalan," katanya.

Ia berjanji akan segera merampungkan permasalahan ini. Terlebih dalam waktu dekat akan memasuki musim penghujan. Intinya adalah ruas jalan kawasan

tersebut kembali bisa dilewati.

Terkait keberadaan Kabid Drainase dan SAH DPUPKP Kota Jogja Aki Lukman, HP belum memantau. Selain itu dia juga belum mendapatkan laporan. Sesuai dispensasi waktu, terperiksa OTT Proyek Supomo itu seharusnya sudah masuk kerja kemarin.

"Harusnya hari ini (kemarin, Red) masuk, tapi belum terima laporan. Kami juga belum komunikasi dengan yang bersangkutan terkait detail OTT dan statusnya sebagai saksi," ujarnya.

Heroe menegaskan status Aki masih sebatas saksi. Belum ada peningkatan status menjadi tersangka OTT. Dia meminta pihak luar tidak bermain isu. Termasuk ada wacana penghentian Aki sebagai Kabid Drainase dan SAH DPUPKP Kota Jogja.

"Utamakan asas praduga tak bersalah. Desakan (pemberhentian) itu jangan asumsi. Dari KPK saja belum ada komunikasi ke

pemkot terkait status," tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja Kris Sardjono juga belum bisa memberikan keterangan terkait hal ini. "Maaf saya baru di Rumah Sakit Sardjito," balasnya melalui Whatsapp, kemarin (26/8).

Sementara menurut keterangan salah seorang front office Kantor DPUPKP Kota Kota Jogja yang tidak mau disebutkan namanya, ALN kemarin sudah mulai bekerja. "Sudah masuk, tapi sedang keluar," jelasnya.

Kepala Inspektorat Kota Jogja Maryoto akan memberikan sanksi bagi ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi (tipikor).

Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka diberhentikan tidak dengan hormat.

"Jelas kalau kena kasus tipikor dan sudah ada putusan inkras atau terbukti, akan dikeluarkan dengan tidak hormat," jelasnya.

Forpi Usulkan ASN Mundur Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja meminta aparat sipil negara (ASN) terlibat OTT Proyek Supomo mengundurkan diri. Usulan ini bertujuan sebagai sanksi administrasi bagi pelaku. Termasuk agar pelaku mendapat tunjangan dana pensiun dan lainnya.

"Mengajukan pensiun dini se-

belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kaitan dana pensiun agar sesudah penetapan, hak-hak berupa dana pensiun, dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga," kata Koordinator Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba.

Kamba menjelaskan bukan ingin melancarkan keputusan KPK. Usulan tersebut lebih kepada raihan tunjangan kepada ASN pasca penetapan. Dia meminta ASN memikirkan pula dampak kesejahteraan keluarganya.

"Jangan sampai terlalu percaya diri yakin tidak bersalah di pengadilan Tipikor, tetapi nyatanya majelis hakim memvonis bersalah," katanya. (dwi/cr15/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Pengendalian Pembanguna			
3. Inspektorat			
4. Forpi			
5. Dinas PUPKP			
6. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005